

Tinjauan Fiqih Siyāṣah Terhadap Perpres No 64 Tahun 2020 Tentang Kenaikan Iuran
BPJS Pasca Putusan Mahkamah Agung No 7P/HUM/2020

SKRIPSI

Oleh:

Mohamad Dafid Syaifudin

NIM: C95216122



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Tata Negara (Siyāṣah)

SURABAYA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohamad Dafid Syaifudin
NIM : C95216122
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum
Tata Negara (Siyāsah)
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Siyāsah Terhadap Perpres No 64
Tahun 2020 Tentang Kenaikan Iuran BPJS Pasca
Putusan Mahkamah Agung No 7P/HUM/2020

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 3 Januari 2021

Saya yang menyatakan



Mohamad Dafid Syaifudin

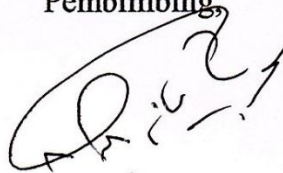
NIM : C95216122

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mohamad Dafid Syaifudin NIM. C95216122 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 3 Januari 2020

Pembimbing



Dr. H. Suis, M.Fil.I

NIP. 196201011997031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mohamad Dafid Syaifudin ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Jum'at, 15 Januari 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

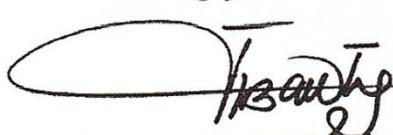
Penguji I,



Dr. H. Suis, M.Fil.I

NIP. 196201011997031002

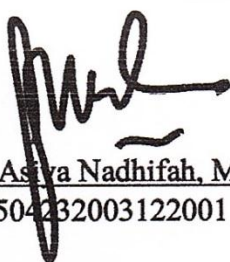
Penguji II,



Dr. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag., M.Si

NIP. 197803152003121004

Penguji III,



Dr. Hj. Nurul Asy'ya Nadhifah, M.HI.

NIP. 197504232003122001

Penguji IV,



Elly Uzlifatul Jannah, M.H.

NIP. 199110032019032018

Surabaya, 15 Januari 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



M. Masruhan M.Ag.

NIP. 195904041988031003

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MOHAMAD DAFID SYAIFUDIN
NIM : C95216122
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM / HUKUM TATA NEGARA
E-mail address : dafid.syaifudin@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PEPRES NO 64 TAHUN 2020 TENTANG

KENAIKAN IURAN BPJS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 7P/HUM/2020

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 3 Januari 2021

Penulis



Mohamad Dafid Syaifudin

ABSTRAK

Skripsi ini mengambil judul “Tinjauan Fiqih Siyāsah Terhadap Perpres No 64 Tahun 2020 Tentang Kenaikan Iuran BPJS Pasca Putusan Mahkamah Agung No 7P/HUM/2020”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan kedalam dua rumusan masalah yaitu : Bagaimana Keputusan Presiden dalam Perpres No. 64 Tahun Dalam Menaikkan Iuran BPJS Pasca Putusan Mahkamah Agung No 7P/HUM/2020. Serta Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyāsah Terhadap Keputusan Presiden dalam Perpres No. 64 Tahun Dalam Menaikkan Iuran BPJS Pasca Putusan Mahkamah Agung No 7P/HUM/2020.??

Skripsi ini merupakan penelitian normatif, sehingga data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*) yang masih relevan dengan sumber data baik dari buku, jurnal, artikel, penelitian terdahulu dan bahan-bahan hukum lainnya. Yang kemudian dianalisis juga dengan menggunakan kaca mata hukum islam yakni *fiqh* khususnya dalam bidang *Siyāsah dusturiyah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Agung yang membatalkan tarif kenaikan iuran BPJS, Presiden tetap menerapkan kenaikan iuran BPJS dengan cara mengeluarkan Perpres no 64 tahun 2020 tentang perubahan kedua tentang perubahan ke kedua peppres no 82 tahun 2018. Tentu hadirnya Perpres tersebut tidak sejalan dengan nafas putusan Mahkamah Agung yang telah membatalkan pasal kenaikan iuran BPJS. Dan secara tidak langsung kebijakan pemerintah melangkahi adanya putusan Mahkamah Agung. alasan MA membatalkan Perpres lama bukan karena masalah besaran nominal tetapi lebih kepada langkah pemerintah dalam menaikkan iuran BPJS karena masalah sebenarnya terletak pada buruknya manajemen BPJS secara keseluruhan sehingga menaikkan iuran tentu bukan solusi yang efektif..

Dalam kajian Hukum Tata Negara (*Siyāsah*) Presiden sebagai pelaku kekuasaan eksekutif disebut juga dengan *Sultah Tanfidziah* yang bertugas melaksanakan undang-undang. Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) yang melaksanakan politik kekuasaan eksekutif sesuai dengan nash dan kemaslahatan. kepemimpinan politik islam didirikan untuk melanjutkan tugas-tugas kenabian dalam memelihara agama dan mengelola kebutuhan dunia masyarakat. Sedangkan dalam bidang yudikatif terdapat lembaga yang di sebut sebagai lembaga *wilayah al – mazalim* sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dalam prespektif Hukum Tata Negara Islam (*Siyāsah*). Lembaga ini bertugas untuk menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan penguasa dan rakyatnya.

Presiden dalam menerbitkan sebuah peraturan khususnya berkaitan dengan progam Jaminan kesehatan harus memperhatikan putusan pengadilan sebagai bentuk kedewasaan berdemokrasi sehingga peraturan yang lahir tidak secara nyata bertentangan dengan putusan pengadilan sebelumnya

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	12
C. Rumusan Masalah	13
D. Kajian Pustaka.....	13
E. Tujuan Penelitian	14
F. Kegunaan Hasil Penelitian	15
G. Definisi Operasional.....	16
H. Metode Penelitian	17
I. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJUAN UMUM TENTANG SIYĀSAH DUSTURIYAH	24
A. Pengertian Fiqh Siyāсах Dusturiyah.....	24
B. Ruang Lingkup Fiqh Siyāсах Dusturiyah	27

C. Macam-Macam Fiqih Siyāsah Dusturiyah	29
1. Konsep Kekuasaan Eksekutif dalam Prespektif <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyah (Sultah Tanfidhiyyah)</i>	31
2. Konsep Kekuasaan Yudikatif dalam prespektif <i>Fiqh Siyāsah (Sultah Qoda’iyyah)</i>	35
3. Konsep Kekuasaan Legislatif dalam prespektif <i>Fiqh Siyāsah Dustūriyah (Sultah Tasri’iyyah)</i>	41
D. Tugas dan Fungsi Fiqih Siyāsah Dusturiyah	45
BAB III TINJUAN UMUM TENTANG KEKUASAAN PRESIDEN	47
A. Tujuan Negara	47
B. Kekuasaan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Presiden	51
C. Hak dan Kewajiban Presiden	59
D. Perpres No 64 Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Agung No 7P/HUM/2020	66
BAB IV ANALISIS PERPRES NO 64 TAHUN 2020 TENTANG KENAIKAN IURAN BPJS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO 7P/HUM/2020 PRESPEKTIF FIQH SIYĀSAH	69
A. Analisa Keputusan Presiden No 64 Tahun 2020 Tentang Kenaikan Iuran BPJS Pasca Putusan Mahkamah Agung No 7P/HUM/2020	69
B. Analisa Fiqh Siyāsah terhadap Perpres No 64 Tahun 2020 Tentang Kenaikan Iuran BPJS Pasca Putusan Mahkamah Agung No 7P/HUM/2020	78
BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	

Daftar Pustaka

Abdul Farid Khaliq, *fikih politik islam*, diterjemahkan Faturrahman A, Hamid,Lc, Jakarta: Amzah, 2005

al-Mawardi Imam, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, 25

Amirudin Hasbi, *konsep negara islam menurut Fazlur Rahman*, Yogyakarta: UII Press, 2000

Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet 13, 2006.

Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 8, Jakarta, Gema Insani 2011.

Basiq H. A. Djalil, *Peradilan Islam*, Jakarta: AMZAH, 2012

Benda Erns *pelaksanaan keputusan Mahkamah Konstitusi di Negara Negara Trasnformasi dengan contoh Indonesia*, Jakarta, Konrad Adenauer Stifung, 2005

Djazuli H.A, *Edisi Revisi Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*,. Jakarta: Prenada Media, 2003

-----*.Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta : Kencana. 2009

Fadli Moh, *Nondelegationdoctrine dan Peraturan delegasi di Indonesia*, Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, 2011

-----*Perkembangan Peraturan Delegasi di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung 2011.

Faisal King Sulaiman, *Teori peraturan perundang-undangan dan aspek pengujiannya*, thafamedia, Yogyakarta, 2017

Farida Maria Indrati, *Ilmu perundang-undangan jenis, fungsi, materimuatan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2013

Fathurahman, *Legislatif drafting, pelebagaan metode partisipatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan*, Malang, Setara Press, 2016

Genovese Michael dan Lori Cox Han, *The Presidency and The Challenge Of Democracy*, palgrave macmillan, New York, 2006

Hasbi T. M. Ash Shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki

HR Ridwan, *Fiqh politik, Gagasan, Harapan, dan Kenyataa*, Yogyakarta, UII Press, 200

HS Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Yogyakarta, 2012.

Ibnu Mugar Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyāsah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2000

Imam Amrusi Jailani, dkk, *Hukum Tata Negara Islam* Surabaya, IAIN Press, 2011

Iqbal Muhammad, *fikih Siyasah*, Jakarta, Gaya media pratama, 2001

----- *Fiqh Siyasah Konstektuaisasi doktrin politik Islam* Jakarta: prenamedia group, 2014

Kami Sukron, *Pemikiran Politik Islam Tematik*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013

Koentjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997

Kusnardi Moh, *Ilmu Negara*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000

Manan Bagir, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan di Indonesia*, Jakarta, IND Hill CO, 1992

----- *lembaga kepresidenan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2003

----- *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2003

Oesman Octojo, *Pancasila Sebagai Ideologi*, Cet 1, Jakarta, BP 7 Pusat, 1990

Pulungan Suyuthi, *Fiqh Siyasah*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1997.

sajali Munawwir, *islam dan tata negara, ajaran sejarah dan pemikiran* Jakarta; UI press, 1990

Saragih Bintang R, *Susunan Kekuasaan Menurut UUD 1945*, Jakarta, Gramedia, 1989

Sirajuddin Fatkhurrohman, *Legislatif Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Malang : Setara Press, 2016

Soekanto Soerjono *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007.

Soemantri Sri Martosoewirganjo, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara*, Bandung, Alumni

Strong C. F, *Modern Political Constitution*, London : Sidgwick & Johnson,

Suntana, Ija *model kekuasaan legislatif dalam sistem ketatanegaraan islam*, Bandung, PT Reflika editama, 2007

Suyuthi J. Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997

Tim Pengajar Ilmu Negara, FH UI, cetakan pertama, FH UI, Depok, 2004

Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika 1996

WEB

KPCDI, “Dinilai Diskriminatif, KPCDI Gugat Perpres 75/2019 ke MA”,

<https://kpcdi.org/2019/12/06/dinilai-diskriminatif-kpcdi-gugat-perpres-75-2019-ke-ma/>, dikases pada 2 Juli 2020.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/3f67e631733011311de76c>

[17af10bc10.html](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/3f67e631733011311de76c17af10bc10.html)

https://www.researchgate.net/publication/338111817_PRO_DAN_KONTRA_KEN

[AIKAN_BIAYA_BPJS_PER_JANUARI_2020/link/5dff93fba6fdcc2837380](https://www.researchgate.net/publication/338111817_PRO_DAN_KONTRA_KEN_AIKAN_BIAYA_BPJS_PER_JANUARI_2020/link/5dff93fba6fdcc2837380)

[6ad/download](https://www.researchgate.net/publication/338111817_PRO_DAN_KONTRA_KEN_AIKAN_BIAYA_BPJS_PER_JANUARI_2020/link/5dff93fba6fdcc28373806ad/download)

JURNAL

Mohammd Mahrus Ali, *Konstitusionalitas dan Legalitas Norma dalam pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar*, Jurnal Konstitusi, Vol 12 No 1 , 2015 hal. 1.

Jurnal Konstitusi volume 12 nomor 3 , September 2015

Marihot Nasution, Polemik Kenaikan Iuran BPJS di Tengah Pandemi, Buletin

APBN Vol. Ed. 11, Juni 2020

UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA